SUB BAGIAN HUMAS DAN TU KALAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI
SUMATERA BARAT
Jl. Khatib Sulaiman No. 54, Padang 25137 Tlp. 0751-40818 Fax 0751-40811, 40817

Koran		Hlm
Haluan		
Padang Ekspres		
Singgalang		
Posmetro	✓	11
.....		

Tahun : 2017			
Bulan			
Jan	✓	Jul	
Feb		Ags	
Maret		Sep	
April		Okt	
Mei		Nov	
Jun		Des	

Tanggal				
1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31				

Segera Audit Keuangann, Hendrajoni Surati BPK dan BPKP

PESSEL, METRO

Bupati Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Hendrajoni akan segera menyurati Badan Pemeriksa Keungan Pusat-Republik Indonesi (BPKP-RI) dan Badan Pemeriksa Keungan Provinsi Sumtera Barat (BPKP) untuk berkunjung ke pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M Zain yang terbengkalai itu, dengan tujuan untuk segera diudit keungannya.

Sebab, katanya, pembangunan RSU M Zein itu menelan dana sebesar Rp96 miliar dan Alat Kesehatan (Alkes) sebanyak Rp3 miliar, hingaa kini pembangunnya dihentikan dikarenakan dokumen AMDAL nya belum kunjung selesai.

Padahal, untuk biaya pengurusan AMDAL nya sudah di kucurkan sebanyak Rp600 juta bersumber dari dana APBD Kabupaten." Ini ada apa, biaya pengurusan AMDAL-nya sudah disetujui oleh dewan hingga kini titik terangnya tak kunjung berkejelasan," ujarnya.

"Secepatnya akan kita agendakan, namun kita berkirim surat ke BPK-RI dan BPKP, mengenai pembangunan RSU M Zein terhenti disebebkan dokumen AMDAL nya belum ada," lanjutnya.

Hendrajoni menuturkan, idealnya pembangunan RSU M Zein itu sudah selesai pada tahun 2016 silam, makanya pihaknya akan segera kirim surat ke dua insantsi itu untuk di audit secepatnya, guna memberikan kepastian kepada penegak hukum dan tidak menimbulkan isu yang miring kepada dirinya.

"Sekali lagi, saya akan secepatnya mengirim surat ke BPK-RI dan BPKP untuk segera di audit keuangannya, dimana pembangunannya sudah dua tahun terbengkalai, saya tidak ingin pembangunan RSU M Zein itu imbasnya kepada saya, dan saya saat ini trasfaran kepada publik," tegasnya.

Di sisi lain, Hendrajoni menuturkan, penghentian pembangunan RSU itu semata-mata untuk taat aturan. "Saya baru sebelas bulan jadi bupati. Disaat saya menjabat satu semester kemaren sudah saya cek, ternyata andalnya belum ada. Tapi kok pembangunannya sudah jalan. Makanya saya hentikan. Bila dibiarkan tanpa AMDAL, saya khawatir akan bermasalah pada kemudian hari," ujarnya.

Menurutnya, bila AMDAL-nya telah selesai diurus dan diterbitkan pihak terkait, maka pembangunan RSU itu akan dilanjutkan. Pasalnya, RSU itu sangat penting untuk memberikan pelayanan maksimal dengan fasilitas yang lebih refresentatif.

"Ada yang tidak mengerti masalah, lalu sembarangan komentar terkait penghentian proyek itu. Lalu, saya jelaskan dan baru merekamereka itu mengerti serta sadar bahwa itu dilakukan demi kepentingan RSU ke depan dan lingkungan sekitarnya," ujarnya mantan perwira menengah Bareskrim Polri itu.

Selain harus adanya pengelolaan limbah rumah sakit yang baik, dirinya menyebutkan RSU itu juga harus mempertimbangkan Pessel sebagai daerah rawan bencana.

"Jadi, bangunannya harus ramah bencana gempa, Tsunami dan longsor. Jadi, keselamatan masyarakat kita yang ada di dalamnya harus diperhatikan juga."

Diakuinya, dirinya sebagai bupati akan memprioritaskan pengoperasian RSUD M Zein itu. Apalagi dana pembangunan RSUD itu sebesar Rp 96 miliar berasal dari PIP.

"Makanya akan kita surati BPK RI dan BPKP untuk segera diaudit keungannya. Dan saya tak ingin dalam pengerjaan ini saya terlibat makanya saya lakukan demikian," tutupnya. (i)